

---

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA PT. BANK KARTADHANI MULYA  
KABUPATEN SUKOHARJO)**

**Heni Ramita Sari<sup>1)</sup>, Setyani Sri Haryanti<sup>2)</sup>**  
Program Akuntansi, STIE AUB Surakarta  
Email: heniramita@gmail.com

**ABSTRACT**

*Internal control is an organization planning and method which is used to keep or protect assets, to create accurate and trusted information, to fix efficiency, and to drive the management policy to be obeyed. The purposes of this research are to know the implementation of internal control system towards credit loan at PT. BPR Karthadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo.*

*This research uses case study at PT. BPR Kartadhani Mulya in Sukoharjo. Technique of collecting data uses interview, observation, and documentation. While technique of analyzing data uses control testing by using stop-or-go sampling method.*

*The result of analysis data can be summarized that internal control system towards credit loan which is done by PT. BPR Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo has met the requirement of internal control system according to COSO (Committee of Sponsoring Organization). It consists of control environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, and controlling.*

*Keywords: internal control system, the effectiveness of internal control, credit loan.*

**I. PENDAHULUAN**

Peranan lembaga perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, baik perorangan, maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Menurut Kasmir (2014:14) sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, perbankan mempunyai kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Abdullah dan Tantri,2012:162). Sebelum kredit diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan dikembalikan.

Marinto (2015:2) menyatakan bahwa penggunaan sistem dan prosedur dalam memberikan kredit ini didasarkan dalam upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah atau kredit macet timbul karena calon debitur tidak mampu melakukan kewajibannya dalam melunasi pinjaman yang sudah diterimanya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh pihak kreditor dan debitur. Kredit bermasalah atau kredit macet akan mengakibatkan bank mengalami kerugian, dan kerugian tersebut bisa seperti kurang lancarnya perputaran dana yang ada pada bank.

Hindarto et al (2014) Aktivitas pengendalian pada ketepatan pemberian kredit akan selalu berpengaruh pada kelancaran usaha bank pada keseluruhan. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menganalisis kredit dapat mengakibatkan kerugian dan mengganggu kelangsungan usaha bank tersebut. Kelancaran penyaluran kredit sangat tergantung peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak debitur untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Dengan adanya prosedur penyaluran kredit yang efisien dan efektif diharapkan kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan risiko kegagalan kredit menjadi kecil.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank. Permasalahan itu bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Untuk menghindari dan meminimalkan kredit yang bermasalah maka diperlukan adanya kontrol yang baik dari suatu perusahaan terhadap prosedur pemberian fasilitas kredit. Kontrol yang dimaksud adalah Pengendalian Internal. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja (AICPA:2002). Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang sehat dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pengurus dan para pejabat bank. Berdasarkan SE No.5/22/DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

PT. BPR Kartadhani Mulya sebagai salah satu bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau disebut juga dengan istilah kredit, serta turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi di Indonesia. Dengan penyaluran kredit tersebut kepada masyarakat diharapkan bahwa dalam dunia usaha dapat bergerak dan tercipta suatu lapangan pekerjaan. Untuk menjaga kredit tersebut agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan serta penyelewengan maka sistem dan prosedur yang dimiliki oleh PT. BPR Kartadhani Mulya perlu diteliti apakah sudah berjalan dengan baik. Berjalannya sistem dan prosedur yang baik perlu diimbangi dengan adanya pengendalian kredit yang cukup kuat sebagai dasar dari kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Dengan pengendalian kredit yang cukup kuat maka kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah atau disebut dengan istilah kredit dapat diminimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi bank

yang sehat. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis memilih judul “**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo)**”

#### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit di PT. BPR. Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo?

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di PT. BPR. Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit di PT. BPR. Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Bank Perkreditan Rakyat**

- a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Menurut Manurung dan Raharja (2004:135) fungsi BPR adalah :

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunann di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan

- c. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Karena, BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Usaha yang diperkenankan Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya.
  - b. Memberikan kredit
  - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank lain.
2. Usaha yang dilarang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
  - a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
  - b. Melakukan kegiatan valuta asing
  - c. Melakukan penyertaan modal
  - d. Melakukan usaha perasuransian
  - e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan diatas.

## 2. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

### b. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip pemberian kredit didasarkan pada Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (Nomor 8/24/PBI/2006), secara umum bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit “*The 5C Analisis of Credit*”, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*.

Selain itu menurut Kasmir (2014:119) penilaian kredit dapat dilakukan dengan analisis prinsip 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*

c. Pengertian Pengendalian Internal

Krismiaji (2010:218) mengartikan pengendalian internal sebagai rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen

Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Menurut (Arens et al., 2011:320) Manajemen biasanya memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal, diantaranya adalah :

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

d. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Komponen penting pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) di antaranya meliputi lima unsur yaitu : (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Aktivitas pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pengawasan (Arens et al., 2011:321).

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal tersebut terhadap entitas.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis oleh manajemen atau risiko-risiko yang relevan terhadap persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Aktivitas Pengendalian (*Internal Control Activities*)

Aktivitas pengendalian termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda, seperti : (1) Pemisahan tugas yang memadai; (2) Otorisasi yang tepat

atas transaksi dan aktivitas; (3) Dokumentasi dan catatan yang memadai; dan (4) Pengendalian fisik aset dan catatan-catatan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya.

### III. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran tentang analisis sistem pemberian kredit dan penerapan sistem pengendalian internal pada PT. BPR Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang terdiri dari non angka yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Data primer; dan (2) Data Sekunder.

#### Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna menunjang keakuratan penelitian yaitu : (1) Metode observasi; (2) Wawancara; (3) Dokumentasi; (4) Kuesioner.

#### Teknis Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan untuk menggunakan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala unit, mantri atau *account officer* pada bagian kredit untuk

- memperoleh data mengenai kebijakan dan aktivitas pemberian kredit pada PT. BPR Kartadhani Mulya.
- b. Membandingkan prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang telah diterapkan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan aktivitas pemberian kredit pada PT. BPR Kartadhani Mulya dengan teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis 5C dan 7P.
  - c. Membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan aktivitas pemberian kredit pada PT. BPR Kartadhani Mulya
  - d. Melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern yang telah diterapkan pada PT. BPR Kartadhani Mulya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen dan catatan akuntansi, wawancara, serta sistem pengendalian intern yang telah terstandar.
  - e. Mencari solusi terhadap masalah atau kendala yang dialami oleh PT. BPR Kartadhani Mulya dan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### **Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di PT. BPR. Kartdhani Mulya**

Dalam hal ini penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada PT. BPR Kartadhani Mulya berdasarkan lima komponen pengendalian internal yang saling terkait menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*, lima komponen ini harus terpenuhi dalam kegiatan operasional sehari-hari agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik. Penerapan sistem pengendalian terhadap pemberian kredit pada PT. BPR Kartadhani Mulya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan kedisiplinan dan struktur dari semua komponen pengendalian lainnya. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian internal antara lain :

- a. Integritas dan nilai etika

Perusahaan dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah harus memiliki etika atau ketentuan yang telah didesain oleh pimpinan agar

efektifitas struktur pengendalian internal tercapai. Wujud atau nilai etika itu dapat berupa etika berkomunikasi, disiplin, dan contoh perilaku yang baik dalam pelayanan dan penanganan kepada nasabah. Adanya kebijakan bahwa semua karyawan dituntut untuk disiplin dan berlaku jujur dalam setiap melakukan pekerjaan. Hal tersebut juga diikuti komunikasi yang terbuka dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika bermasyarakat yang baik. Jadi, selain menerapkan kedisiplinan dan perilaku yang bertanggung jawab juga diharapkan agar seluruh karyawan untuk menciptakan lingkungan budaya kerja yang baik.

b. Komitmen terhadap kompetensi

PT. BPR Kartadhani Mulya menentukan tingkat kompetensi secara spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Penentuan calon pegawai untuk menjadi staf harus berpendidikan minimal D3 dan penentuan pegawai untuk menjadi Kepala Bagian harus berpendidikan minimal S1. Perekrutan calon pegawai di PT. BPR Kartadhani Mulya melalui beberapa tahap yaitu tahap pertama calon pekerja melalui training kerja selama 3 bulan, tahap kontrak 1 tahun, tahap menjadi calon pegawai, dan tahap terakhir diberlakukan sebagai pegawai tetap. PT. BPR Kartadhani Mulya merealisasikan program untuk pengembangan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian khususnya dalam bidang perbankan. Program pengembangan kompetensi tersebut didukung dengan adanya agenda rencana pendidikan dan pelatihan dalam setahun. Realisasi program pengembangan tersebut diselenggarakan oleh perusahaan sendiri maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum pada perseroan terbatas, yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. PT. BPR Kartadhani Mulya juga memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang berfungsi untuk mengawasi intern perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Di PT. BPR Kartadhani Mulya ini belum dibentuk Komite Audit, sehingga peran Komite Audit digantikan oleh Pejabat Eksekutif Internal Audit. Pejabat Eksekutif Internal Audit mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan secara berkala, melakukan audit atas agunan yang diterima

d. **Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi**

Di PT. BPR Kartadhani Mulya memiliki filosofi yaitu “Disiplin, Inovatif, Orientasi Pelanggan, dan Terpercaya”. Pihak manajemen PT. BPR Kartadhani Mulya mengutamakan komunikasi yang membangun hubungan baik antar pegawai ataupun dengan tingkat manajemen. Hal tersebut diwujudkan dengan diadakan pertemuan rutin seminggu sekali, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antar pegawai agar mengantisipasi terjadinya konflik.

Gaya operasi manajemen PT. BPR Kartadhani Mulya mengupayakan interaksi yang erat antara pimpinan dan pegawai dengan memberikan perhatian tinggi terhadap pengembangan kualitas pegawai. Hal ini dilakukan melalui adanya family gathering yang berguna untuk mengakrabkan hubungan antara pimpinan dengan pegawai, dan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian.

e. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi didalam suatu perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. struktur organisasi disusun sesuai dengan kebutuhan bertujuan untuk dapat menerapkan masing-masing bagian sehingga tugas wewenang dan tanggungjawab masing-masing karyawan dapat dilaksanakan dengan jelas dan tepat. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka pengendalian internal dapat terlaksana dengan baik.

f. **Kebijakan dan praktik sumber daya manusia**

Pada PT. BPR Kartadhani Mulya merupakan salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kebijakan dan praktik pada PT. BPR Kartadhani Mulya yaitu mengharuskan pengambilan cuti bagian karyawan yang berhak. Tujuan cuti ini adalah untuk pengendalian kinerja karyawan. Pada saat karyawan cuti pihak Audit Internal mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan karyawan tersebut untuk mengetahui kinerja karyawan yang bersangkutan.

PT. BPR Kartadhani Mulya terdapat mutasi kerja yang merupakan kebijakan dari Direksi. Mutasi kerja dilakukan apabila terdapat karyawan yang pensiun atau faktor lain yang membuat karyawan tidak bekerja lagi di PT. BPR Kartadhani Mulya sehingga perlu digantikan oleh karyawan lain. Selain itu juga terdapat promosi karyawan, promosi karyawan ini dapat dilakukan dengan melihat kinerja karyawan terlebih dahulu. Apabila kinerja karyawan baik maka

karyawan tersebut akan dipromosikan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

## 2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Resiko yang paling mungkin terjadi di PT. BPR Kartadhani Mulya adalah adanya kredit yang bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan atau diketahui oleh pihak bank, maupun nasabah yang bangkrut dari usahanya.

Antisipasi dini terhadap kredit macet telah ditetapkan di PT. BPR Kartadhani Mulya dengan melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan antara lain : adanya pemantauan kredit secara berkala, pihak bank melakukan seleksi kepada calon debitur dengan menggunakan pendekatan 5C untuk menentukan kelayakan kredit yang diberikan. Apabila debitur menunjukkan gejala-gejala akan adanya kredit bermasalah, maka Tim Kredit harus melakukan penagihan secara insentif.

Selain itu, resiko yang kemungkinan dihadapi oleh PT. BPR Kartadhani Mulya ialah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dengan melakukan kecurangan seperti angsuran yang telah diterima dari debitur tidak disetorkan ke PT. BPR Kartadhani Mulya tetapi masuk ke kantong karyawan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, bagian pengawasan internal audit di PT. BPR Kartadhani Mulya mengantisipasi dengan *on the spot* ke debitur dan mencocokkan catatan milik debitur dengan catatan milik PT. BPR Kartadhani Mulya.

Resiko lain seperti pengambilan data maupun dokumen milik PT. BPR Kartadhani Mulya yang bertujuan untuk kepentingan pribadi diantisipasi dengan mengatur *password* untuk setiap komputer sehingga hanya bisa diakses oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap komputer itu saja dan menyimpan dokumen-dokumen penting pada lemari terkunci. PT. BPR Kartadhani Mulya juga mem-*back up* data untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data hilang karena kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja seperti bencana alam.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibentuk untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan di PT. BPR Kartadhani Mulya adalah :

### a. Pemisahan Tugas Yang Memadai

Di BPR Kartadhani Mulya terdapat pemisahan tugas antar bagian atas proses pemberian kredit yaitu bagian permohonan kredit dilakukan oleh bagian pelayanan atau Customer Service, bagian survei dan analisis kredit dilakukan oleh Account Officer dan Appraisal yang bertugas melakukan penilaian terhadap debitur, bagian keputusan kredit dilakukan oleh Direksi yang bertugas memberikan persetujuan otorisasi permohonan kredit disetujui atau tidak, dan bagian pencairan dan pelunasan kredit dilakukan oleh bagian Teller yang berfungsi menerima semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan debitur.

b. Dokumen dan catatan yang memadai

Dalam perancangan dokumen dan catatan yang digunakan PT. BPR Kartadhani Mulya telah memadai dengan dipenuhinya syarat pengendalian internal yaitu :

1. Dokumen diisi pada saat terjadinya transaksi atau segera setelah transaksi terjadi, sehingga menghindari kesalahan pencatatan.
2. Dokumen dan catatan dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pemahaman pengisian dokumen dan catatann tersebut.
3. Dokumen dilengkapi kolom tanda tangan bagi yang berwenang mengotorisasi.
4. Perancangan dokumen telah bernomor urut dan sesuai dengan
5. Dokumen dibuat rangkap dan diberi warna berbeda sehingga mudah diingat dan dibedakan.
6. Tembusan dokumen dibuat sesuai dengan keperluan, karena pembuatan formulir yang terlalu banyak dapat mengurangi efisiensi dalam pengarsipan dan biaya pembuatannya.

Hal tersebut diatas bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan tidak ada transaksi yang dicatat lebih dari satu kali.

c. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas

Pada PT. BPR Kartadhani Mulya masing-masing memiliki tugas dan otorisasi sesuai dengan kapasitas kredit. Setiap transaksi pemberian kredit harus mendapat persetujuan dilakukan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini transaksi mulai dari permohonan sampai dengan pelunasan kredit ditanda tangani oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi terhadap hal tersebut. Tahap permohonan kredit oleh Customer Service, tetapi survei dan analisis kredit diotorisasi oleh Kepala Bagian Kredit. Kemudian tahap keputusan atas permohonan kredit diotorisasi oleh Direktur, tahap pencairan kredit diotorisasi oleh Bagian Kasir.

d. Pengendalian fisik aset dan catatan-catatan

PT. BPR Kartadhani Mulya secara keseluruhan telah menggunakan sistem yang saling berhubungan dan terkomputerisasi, sehingga memudahkan input data yang dilakukan oleh petugas. Dalam penginputan data tersebut tidak bisa diakses oleh siapapun, kecuali petugas berwenang yang diberikan kepercayaan memegang fungsi tersebut dan memiliki *password* untuk masuk kedalam sistem. Dengan sistem seperti ini keamanan akses input data kedalam sistem cukup terjaga.

Dalam hal pengendalian terhadap aset perusahaan perlindungan terhadap catatan dan dokumen juga diperlukan. PT. BPR Kartadhani Mulya sudah melakukan pengendalian fisik dengan memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan arsip, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan catatan dan dokumen perusahaan. PT. BPR Kartadhani Mulya juga sudah melakukan pengendalian agunan atau jaminan kredit dengan melakukan penilaian jaminan sebelum kredit diberikan dan setelah kredit diberikan. Penilaian jaminan dilakukan oleh bagian appraisal dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menyesuaikan antara data jaminan yang diberikan debitur dengan keadaan jaminan yang sebenarnya.

#### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Untuk mencapai pengendalian internal yang efektif, maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Pengendalian internal atas pemberian kredit akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan kelancaran informasi dan komunikasi yang dapat dipertanggung jawabkan antar karyawan sesuai fungsinya masing-masing. Informasi yang terdapat pada PT. BPR Kartadhani Mulya yaitu memproses dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas Bank. Adanya laporan-laporan yang disusun secara periodik yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Selain itu penyajian informasi dalam sistem pemberian kredit dan pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai karena sudah tercatat oleh sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.

#### 5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pada PT. BPR Kartadhani Mulya pelaksanaan pengawasan kredit terbagi secara dua bagian yaitu secara administrasi dan secara fisik dengan cara melakukan pemeriksaan. Pengawasan secara administrasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan segala informasi data yang tersedia berdasarkan catatan yang ada pada bank, informasi laporan dari debitur itu sendiri maupun informasi berdasarkan pihak lain. Sedangkan pengawasan secara fisik adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara melakukan kunjungan langsung kelokasi usaha debitur tersebut.

PT. BPR Kartadhani Mulya yang bertindak dalam pengawasan adalah Bagian Pengawas Internal yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemberian kredit dan kegiatan operasional lainnya. Untuk itu dalam pengawasan pemberian kredit, pengawasan terhadap debitur dilakukan oleh bagian kredit yaitu Account Officer (AO). Untuk tercapainya pengawasan dan pengendalian yang baik, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara karyawan dan pimpinan yang artinya pimpinan akan memberikan atas hasil temuan yang menyimpang dilapangan.

Pengawasan harus dilakukan secara rutin agar segala kegiatan berjalan dengan baik. Pengawasan yang maksimal dilakukan untuk mengetahui keadaan usaha nasabah dan untuk menghindari penyalahgunaan kredit yang telah diberikan. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko yang akan terjadi atas pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Kartadhani Mulya Sukoharjo sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam pemberian kredit di PT. BPR Kartadhani Mulya Sukoharjo.

### **Saran**

Pengendalian internal pada sistem pemberian kredit di PT. BPR Kartadhani Mulya di Sukoharjo sudah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian tidak ditemukan penyimpangan yang terjadi. PT. BPR Kartadhani Mulya harus terus mempertahankan kondisi ini dengan selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang terjadi agar aktivitas bank dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur pengendalian internal pada PT. BPR Kartadhani Mulya sudah sesuai dengan teori pengendalian menurut COSO, tetapi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu belum adanya Komite Audit. PT. BPR Kartadhani Mulya sebaiknya membentuk Komite Audit yang dapat bertanggungjawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal dalam perusahaan, proses pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Abdullah, Thamrin, dan Francis, Tantri. 2012., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marinto, K., Hidayat, R. & Zahro Z.A. 2015. Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Uang Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kertososno-Nganjuk). *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)*, 2 (2): 1-10.
- Hindarto, A. E., M. D. AR, dan Z. ZA. 2014. "Evaluasi sistem pemberian kredit modal usaha dan penerimaan angsuran dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern (Studi Pada Kantor Pusat PD. BPR. BANK Jombang) ". *JAB*, Vol. 8, No., hlm. Bank Indonesia, 2003, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE No.5/ 22/ DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum, Jakarta : Diterktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2002). "Due Profesional Care in The Performance Of Work". *Statement Auditing Standart* No. 230. New York, NY:AICPA
- Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Krismiaji. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN.
- Arens, Alvin A., Beasley, Mark S., dan Elder, Randal J. 2011. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.